

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik, maka pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sangat penting. Pengertian terhadap objek yang diteliti merupakan salah satu unsur dalam pemahaman, untuk itu penulis menjelaskan variabel yang terdapat dalam penelitian.

2.1.1 Migrasi dan Tenaga Kerja

Migrasi tenaga kerja terjadi karena adanya perbedaan antar negara, terutama dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Terjadinya migrasi juga disebabkan oleh adanya faktor kekurangan tenaga kerja di negara tujuan migran, karena rata-rata negara tujuan migran adalah negara maju dengan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi, sehingga tidak mempunyai tenaga kerja yang kurang terampil. Hal ini yang dijadikan sebuah alasan bagi tenaga kerja yang kurang terampil di negara berkembang seperti Indonesia untuk mengirimkan tenaga kerjanya ke negara tujuan yang membutuhkan (Andias, 2014).

2.1.1.1 Definisi Migrasi

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, migrasi secara umum merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah asal menuju daerah tujuan dengan tujuan tertentu. Kemudian migrasi didefinisikan juga sebagai perpindahan sumber daya manusia yang umumnya disebabkan oleh alasan ekonomi, seperti menyangkut lapangan pekerjaan dan jenis pekerjaan atau alasan lain seperti keamanan (Mulyadi, 2003: 28). Sementara itu menurut Martin dan Termos (2015) migrasi adalah

perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang terjadi karena adanya perubahan kondisi kedua daerah tersebut. Perbedaan terbesar yang mendorong terjadinya migrasi adalah kondisi ekonomi dan non ekonomi.

2.1.1.2 Teori Migrasi

1. Teori Revenstein (1885)

Teori migrasi menurut Revenstein (1885) dalam Mulyadi (2003: 131) mengungkapkan bahwa volume migrasi bergantung pada jarak. Migrasi cenderung mencakup jarak pendek dan untuk migrasi jarak jauh pada umumnya sering menuju ke pusat-pusat ekonomi penting. Ravenstein juga mengatakan bahwa keberadaan zona transportasi, industri dan perdagangan menyebabkan peningkatan frekuensi migrasi dan keputusan migrasi dimotivasi oleh insentif ekonomi. Elemen lain dari teori Ravenstein yaitu:

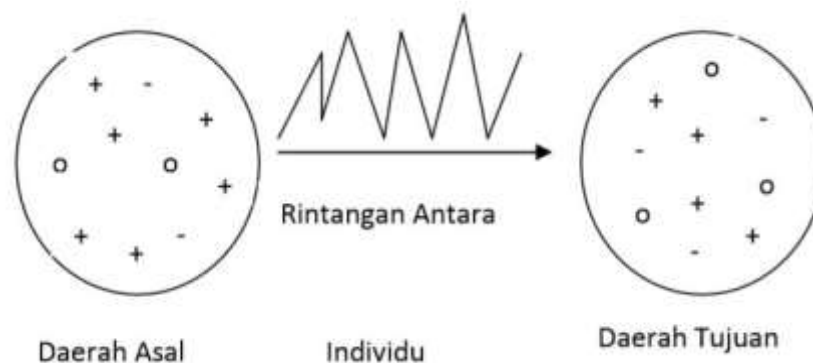
- a. Adanya perbedaan antar desa dan kota membuat kecenderungan melakukan migrasi.
- b. Migrasi bertahap, yaitu arus migrasi yang terarah dan migrasi dari desa ke kota kecil kemudian ke kota besar.
- c. Arus dan arus balik, yaitu setiap arus migrasi utama akan menimbulkan arus balik pengganti.
- d. Kemajuan teknologi mengakibatkan migrasi meningkat.
- e. Perempuan melakukan migrasi pada jarak dekat dibandingkan dengan laki-laki.

2. Teori Everett S. Lee

Teori Everett S Lee (1966) dalam Mulyadi (2015: 129) mengatakan keputusan individu melakukan migrasi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor

pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong berkaitan dengan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara suatu negara dengan negara lain. Seperti kepadatan penduduk yang tinggi mengakibatkan keterbatasannya jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah pengangguran yang semakin tinggi, perbedaan penghasilan satu negara dengan negara lain, keadaan ekonomi yang miskin di daerah asal, dan alasan tingkat pendidikan. Sebaliknya faktor penariknya berkaitan dengan berpindahnya tenaga kerja. Sedangkan teori Everett S. Lee (1976) dalam Mantra (2015: 180) mengatakan bahwa volume migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat keanekaragaman daerah di wilayah tersebut. Faktor penentu penyebab migrasi adalah perbedaan pendapatan antara satu negara dengan negara lainnya. Selain itu, kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan inflasi, pengangguran di suatu wilayah atau negara, tekanan politik, konflik agama dan etnis. Hal ini terutama terlihat di beberapa wilayah tersebut, di mana kapasitas untuk menyerap pekerjaan tidak memadai karena pertumbuhan penduduk yang besar dari tahun ke tahun.

Gambar 2. 1 Teori Migrasi Menurut Everett S Lee



Sumber: Lee dalam Mantra, 2015

Keterangan:

(+): Faktor di mana kebutuhan dapat terpenuhi

(-): Faktor di mana kebutuhan tidak terpenuhi

(0): Faktor netral

Dapat dilihat dari gambar 2.1 tersebut, bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi keputusan migrasi di daerah asal, daerah tujuan, dan hambatan.

Faktor tersebut yaitu:

- a. Faktor positif (+), yaitu faktor yang menguntungkan kalau bertempat tinggal di daerah tersebut seperti pendidikan, iklim, dan pekerjaan atau faktor yang menarik seseorang untuk tidak meninggalkan daerah tersebut.
- b. Faktor negatif (-), yaitu faktor yang memiliki kekurangan di daerah tersebut, sehingga menyebabkan seseorang merasa ingin pindah atau meninggalkan daerah tersebut, misalnya iklim yang tidak sesuai, kepadatan penduduk, dan lain sebagainya.
- c. Faktor netral (0), yaitu faktor yang tidak berpengaruh terhadap keinginan seorang individu untuk tetap tinggal atau pindah ke daerah tujuan.

Kemudian Lee menambahkan bahwa besar kecilnya arus migrasi penduduk dipengaruhi oleh rintangan antara atau hambatan berupa tingginya ongkos pindah, tofografi antara daerah asal dengan daerah tujuan yang berbukit-bukit dan terbatasnya sarana transportasi atau pajak masuk ke daerah tujuan tinggi. Dan juga ada faktor yang tidak kalah pentingnya yaitu faktor individu karena migran tersebutlah yang dapat menilai positif dan negatifnya suatu daerah tersebut atau tidak. Migran ini lah yang memutuskan apakah akan pindah dari daerah asal ke

daerah tujuan atau tidak. Selain itu juga faktor inilah yang mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi.

3. Teori Todaro

Teori Todaro (2003: 375) menyatakan bahwa arus migrasi terjadi karena adanya perbedaan pendapatan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam *Expected Income Model of Rural-Urban Migration*, dimana pindah ke kota memiliki dua harapan, yaitu harapan untuk mendapatkan pekerjaan dan harapan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi daripada pendapatan di daerah asal atau desa. Migran akan meninjau dan membandingkan berbagai peluang pasar tenaga kerja yang tersedia di suatu negara atau wilayah dan kemudian memilih salah satu yang dapat memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dari migrasi. Dengan kata lain, migran akan bermigrasi jika pendapatan yang diterimanya melebihi biaya yang dikeluarkan.

2.1.1.3 Bentuk dan Jenis Migrasi

Menurut Mantra (2015: 178) menyatakan bahwa terdapat dua bentuk migrasi jika dilihat berdasarkan ada atau tidaknya niatan migran untuk menetap yaitu:

1. Migrasi penduduk permanen, yaitu perpindahan penduduk dari daerah asalnya menuju daerah tujuan dan berniat untuk menetap di daerah tersebut.
2. Migrasi penduduk non permanen, yaitu perpindahan penduduk dari daerah asal menuju daerah tujuan dan tidak mempunyai niat untuk menetap di daerah tersebut. Para migran tersebut mempergunakan waktu bekerja sebanyak mungkin agar mendapatkan upah yang banyak untuk dikirim ke daerah asal.

Kemudian berdasarkan jenisnya migrasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Migrasi Nasional

Menurut Nurmawanti (2016: 8), yaitu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dalam lingkup satu negara. Migrasi nasional/internal dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lain untuk menetap. Pada umumnya untuk kepentingan pembangunan atau alasan lainnya. Tujuan utama dari transmigrasi ini untuk pemerataan penduduk dan peningkatan taraf hidup transmigrasi (Mulyadi, 2003: 161).
- b. Urbanisasi menurut Mulyadi (2003: 158) adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Urbanisasi terjadi karena kota mempunyai daya tarik sebagai daerah tujuan dan desa mempunyai daya dorong untuk ditinggalkan. Daya tarik kota antara lain tersedia berbagai lapangan pekerjaan, upah tenaga kerja tinggi, fasilitas hidup lengkap, dan pendidikan yang lebih unggul. Kota besar memang menjanjikan fasilitas yang lebih lengkap. Sedangkan daya dorong desa antara lain lapangan pekerjaan di luar bidang pertanian terbatas, lahan pertanian semakin sempit, upah tenaga kerja rendah, dan fasilitas umum terbatas.
- c. Ruralisasi menurut Nurmawanti (2016: 8) adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Ruralisasi ini merupakan kebalikan dari urbanisasi.

2. Migrasi Internasional

Menurut Nurmawanti (2016: 7), yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Migrasi internasional dapat dibedakan atas tiga macam yaitu:

- a. Imigrasi adalah masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan untuk menetap dengan tujuan secara totalitas menjadi bagian daripada negara yang bersangkutan.
- b. Emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain untuk menetap dengan tujuan secara nyata mengabdikan pada negara baru.
- c. Remigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu negara untuk kembali ke negara asalnya setelah beberapa lama ditinggalkan. Hal ini terjadi pula pada tenaga kerja Indonesia yang sudah habis masa kerjanya kembali ke Indonesia.

2.1.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Migrasi

Menurut Munir (2007) dalam Sasmi dan Bachtriar (2014) mengatakan bahwa mengelompokkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik sebagai berikut:

- a. Faktor pendorong migrasi, yaitu faktor yang mendorong para migran untuk meninggalkan daerah asalnya, misalnya:
 1. Kecilnya upah di daerah asal.
 2. Makin berkurangnya sumber-sumber alam, menurunnya permintaan atas barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu atau bahan dari pertanian.

3. Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal (misalnya di pedesaan) akibat masuknya teknologi yang menggunakan mesin mesin (capital intensive).
 4. Alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bisa mengembangkan karir.
 5. Adanya tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku di daerah asal.
 6. Bencana alam baik banjir, kebakaran, gempa bumi, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit.
- b. Faktor penarik migrasi, yaitu faktor yang dapat memberikan harapan para migran untuk memperbaiki kehidupannya, misalnya:
1. Kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih baik.
 2. Kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.
 3. Adanya rasa superior ditempat yang baru atau kesempatan yang baru untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok.
 4. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan misalnya iklim, perumahan, sekolah, transportasi, dan fasilitas-fasilitas kemasyarakatan lainnya.
 5. Tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung.
 6. Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang dari desa atau kota kecil.

2.1.1.5 Tenaga Kerja

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang sudah dan sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga (Rahmawati, 2010). Menurut Undang-undang Nomor 13 pasal 1 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Badan Pusat statistik (BPS) dalam mengumpulkan data ketenagakerjaan adalah *The Labour Force Concept* yang disarankan oleh *Internasional Labour Organization (ILO)*. Konsep tersebut membagi penduduk menjadi dua kelompok. yaitu penduduk yang termasuk angkatan kerja dan penduduk yang bukan angkatan kerja.

Menurut Mantra (2015: 224) penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Angkatan kerja digolongkan sebagai berikut:

1. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak

terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu suatu usaha/kegiatan ekonomi.

2. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti sakit, menunggu panen, cuti, mogok kerja dan lain sebagainya.

Berdasarkan jenisnya tenaga kerja menurut kemampuannya yaitu:

1. Tenaga kerja terdidik, diartikan sebagai tenaga kerja yang memiliki keahlian, keterampilan di bidang tertentu yang diperoleh dari sekolah atau bisa dikatakan memiliki riwayat pendidikan tertinggi, biasanya untuk tenaga kerja ini maksimal telah lulus S1. Seperti guru, dokter, dan lain sebagainya.
2. Tenaga kerja terlatih, diartikan sebagai tenaga kerja yang terlatih dengan kemampuan atau sudah menguasai pekerjaan tertentu yang diperoleh melalui pengalaman. Seperti mekanik, apoteker dan lain sebagainya.
3. Tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, diartikan sebagai tenaga kerja yang tidak perlu memiliki riwayat pendidikan tinggi, tetapi mengandalkan kekuatan sendiri dan keterampilannya. Seperti pengurus lansia/bayi, buruh bangunan, dan lain sebagainya.

2.1.2 Upah Minimum Provinsi

2.1.2.1 Definsi Upah Minimum

Menurut pasal 1 ayat 1 dari dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 tahun 1999, upah minimum didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Najmutsaqib (2018) menyatakan bahwa upah merupakan harga untuk jasa yang telah diberikan kepada orang lain. Secara teoritis upah yang diberikan oleh para pengusaha dianggap sebagai harga dari tenaga yang telah dikorbankan para pekerja untuk kepentingan produksi.

2.1.2.2 Definisi Upah Minimum Provinsi

Menurut pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-226/MEN/2000 tentang perubahan pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 8, pasal 11, pasal 20, pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Per-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum provinsi adalah upah yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi. Besarnya upah minimum untuk setiap wilayah provinsi atau kota atau kabupaten tidak sama karena tergantung nilai kebutuhan minimum (KHM) di daerah bersangkutan.

2.1.2.3 Teori Upah

Menurut Simanjuntak (1985) dalam Citamaha (2018: 3) mengemukakan bahwa apabila tingkat upah semakin tinggi maka dapat berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi sehingga perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk tetap efisien. Dikatakan pula tingkat upah yang berbeda-beda di berbagai wilayah mendorong tenaga kerja untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang sesuai di negara lain.

Adapun upah yang diterima pekerja dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja.

2. Upah Riil, yaitu upah nominal yang telah diterima para pekerja, jika ditukarkan dengan jasa dan barang, maka diukur dengan banyaknya barang dan jasa yang didapatkan dari pertukaran tersebut.

2.1.2.4 Faktor yang Mempengaruhi dalam Menentukan Tingkat Upah

Menurut Zhigang dan Shunfeng (2006) dalam menentukan tingkat upah ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat upah tersebut, yaitu:

1. Pada permintaan dan penawaran tenaga kerja, ketika jumlah tenaga kerja yang terampil terbatas jumlahnya, pada akhirnya akan meningkatkan upah tersebut. Sehingga penawaran yang besar ada di posisi tertentu dengan tingkat upah yang standar.
2. Prestasi para pekerja kepada perusahaan, hal tersebut akan berpengaruh ketika semakin besar tingkat produktivitas yang diberikan tenaga kerja, maka akan semakin besar imbalan yang diterima oleh para pekerja.
3. Kemampuan membayar upah, dimana upah merupakan salah satu biaya produksi perusahaan, jika biaya produksi meningkat maka akan menimbulkan kerugian dan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi fasilitas.
4. Pada Pemerintah, pemerintah ini melalui wewenang dan peraturan yang dimilikinya dapat menentukan tingkat upah tersebut, seperti untuk menentukan upah minimum provinsi atau upah minimum regional.

Upah minimum menjadi acuan bagi pekerja dalam mencapai pendapatan yang akan diterimanya. Perbedaan upah minimum di beberapa daerah menjadi faktor perpindahan penduduk dari daerah asalnya ke daerah/negara lain, karena perbedaan pendapatan yang diperoleh lebih menguntungkan secara ekonomi. Dari

beberapa penjelasan di atas, determinan gaji sangat mempengaruhi migrasi seseorang (Mantra, 2015: 218).

2.1.3 Rata-rata Lama Sekolah

2.1.3.1 Konsep Lama Sekolah

Konsep lama sekolah menjadi sebuah investasi, diyakini oleh setiap negara bahwa lama sekolah merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan pembangunan. Menurut teori *human capital* dalam Khairi (2017: 3) lama sekolah akan mempengaruhi kemampuan dan kecakapan yang diperoleh melalui pendidikan. Perolehan keterampilan dan kemampuan dari lama sekolah juga akan menghasilkan tingkat balik atau *rate of return* yang sangat tinggi terhadap perhasilan seseorang.

2.1.3.2 Model Pengukuran Rata-rata Lama Sekolah

Menurut BPS Sirusa rata-rata lama sekolah (RLS)/ *mean years school* (MYS) dapat didefinisikan sebagai jumlah tahunan yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu sebagai berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$$

Dimana:

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

Xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Dapat dilihat berarti penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolahnya selama 6 tahun, lalu tamat SMP dapat diperhitungkan lama sekolahnya

9 tahun, tamat SMA berarti lama sekolahnya 12 tahun, dan tamat S1 dapat diperhitungkan lama sekolah 16 tahun dan seterusnya. Jadi semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi tingkat pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah ini digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan yang ditamatkan oleh masyarakat di suatu wilayah pada usia 25 tahun keatas.

Pendidikan menjadi modal manusia dalam perkembangan kehidupan, kualitas sumber daya manusia akan menciptakan produktivitas tenaga kerja. Lamanya sekolah yang ditempuh akan menjadi gambaran dari modal manusia yang dimilikinya (Nabila dan Pardede, 2014).

2.1.4 Kepadatan Penduduk

2.1.4.1 Konsep Kepadatan Penduduk

Bagi negara berkembang keadaan perkembangan penduduk yang cepat justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Sesuai yang dinyatakan Todaro (2003: 376) persoalan kependudukan tidak semata-mata menyangkut jumlah akan tetapi juga meliputi kualitas hidup dan kesejahteraan materil.

Menurut Mantra (2015: 74) kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk per satuan unit wilayah, atau dapat ditulis dengan rumus:

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk suatu wilayah}}{\text{Luas Wilayah (km}^2\text{/ha)}}$$

Kepadatan penduduk di suatu wilayah dapat dibagi menjadi empat bagian, antara lain:

1. Kepadatan Penduduk Kasar (Crude Density of Population), atau sering pula disebut dengan kepadatan penduduk Aritmatika, yaitu menunjukkan jumlah

penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Luas wilayah yang dimaksud adalah luas seluruh daratan pada suatu wilayah administrasi.

2. Kepadatan Fisikologis (Physiological Density), yaitu jumlah penduduk tiap kilometer persegi tanah pertanian atau lahan yang ditanami (cultivable land).
3. Kepadatan Penduduk Agraris, yaitu menunjukkan jumlah penduduk petani tiap-tiap km² tanah pertanian, atau wilayah lahan yang ditanami (cultivable land).
4. Kepadatan Penduduk Ekonomi, yaitu besarnya jumlah penduduk pada suatu wilayah didasarkan atas kemampuan wilayah yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 tahun Tahun 1960 dalam pasal 1 ayat 3 bahwa kriteria kepadatan penduduk itu dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah/wilyah dan faktor lainnya. Maka luas maksimum yang dimaksud pasal 1 yaitu:

Tabel 2. 1 Kriteria Kepadatan Penduduk

Kriteria Daerah	Kepadatan Penduduk (km²)
Tidak Padat	0 – 50
Kurang Padat	51 – 250
Cukup Padat	251 – 400
Sangat Padat	401 – ke atas

Sumber: Perpu No 56 tahun 1960 dalam Bq Mahyuniati (2013), diolah

Kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas lingkungan. Karena tingginya aktivitas sosial ekonomi penduduk ibu kota provinsi akan membatasi lingkungan baik darat/tanah, air dan udara. Semakin tinggi kepadatan penduduk, maka semakin besar pula tekanan, sehingga menyebabkan seseorang akan melakukan migrasi.

2.1.4.2 Dampak Kepadatan Penduduk

Menurut Najmusaqib (2018) kepadatan penduduk yang tidak merata menjadi sebuah permasalahan, sehingga dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat atau penduduk. Dampak dari ledakan jumlah penduduk tersebut yaitu:

1. Sumber kebutuhan pokok yang semakin terbatas seperti pangan, sandang, dan perumahan yang layak. Akibatnya, sumber-sumber dasar tersebut tidak lagi sebanding dengan pertumbuhan penduduk.
2. Jumlah lapangan pekerjaan yang semakin terbatas, sehingga angkatan kerja tidak tertampung yang berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dan penurunan kualitas sosial. Seperti banyaknya pengemis, kriminalitas, dan lain sebagainya.
3. Berdampak juga terhadap fasilitas kesehatan dan sosial yang tidak tercukupi, seperti rumah sakit, sekolah dan fasilitas pendukung lainnya.

2.1.5 Kemiskinan

2.1.5.1 Definisi Kemiskinan

Menurut World Bank (2015: 23) kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain. Kemiskinan juga didefinisikan sebagai suatu kondisi seseorang yang tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu wilayah/negara. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan

untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun pangan (Supriatna, 1997 dalam Kadji).

2.1.5.2 Konsep Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistika kriteria yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, diukur dari segi pengeluaran. Dengan demikian, penduduk miskin adalah mereka yang pengeluaran per kapita bulannya berada di bawah garis kemiskinan.

Konsep Garis kemiskinan (GK) menurut BPS yaitu mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama satu bulan, baik dalam kebutuhan makanan maupun non makanan. Garis kemiskinan (GK) terdiri dari dua yaitu:

1. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, minyak dan lemak, dan lain sebagainya).
2. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan pokok minimum untuk kebutuhan non makan berupa perumahan, sandang, Pendidikan dan Kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komiditi di perkotaan dan

47 jenis komoditi di perdesaan. Kemudian untuk menghitung garis kemiskinan (GK) yaitu:

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan:

GK = Garis Kemiskinan.

GKM = Garis Kemiskinan Makanan.

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian yang menguraikan hubungan antar variabel penelitian berdasarkan pendapat dan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengaruh Kepadatan Penduduk, Upah Minimum Provinsi (UMP), Kesempatan Kerja terhadap Migrasi Internasional Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2016. (Indi Najmutsaqib, 2018)	Kepadatan Penduduk, Upah Minimum Provinsi (UMP)	Kesempatan Tenaga Kerja	1. Kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap migrasi internasional tenaga kerja. 2. Upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap migrasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>internasional tenaga kerja.</p> <p>3. Kesempatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap migrasi internasional tenaga kerja.</p>
2.	<p>Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Migrasi Masuk ke Provinsi DKI Jakarta. (Karina Khasida Rismalisa, 2020)</p>	<p>Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pendidikan atau (Rata-rata lama sekolah)</p>	<p>PDRB dan Jumlah Penduduk</p>	<p>1. Upah minimum provinsi dan tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap migrasi penduduk masuk ke provinsi DKI Jakarta</p> <p>2. PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap migrasi penduduk masuk ke provinsi DKI Jakarta</p>
3.	<p>Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Migran Bekerja di Dalam Negeri dan Luar Negeri (Studi Kasus di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang) (Tri Andias, 2014)</p>	<p>Upah dan tingkat pendidikan/ RLS</p>	<p>Jenis kelamin, beban tanggungan, kepemilikan lahan, dan kepemilikan relasi</p>	<p>1. Kepemilikan relasi tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan migrasi.</p> <p>2. Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan migrasi,</p> <p>3. Upah, jenis kelamin, beban tanggungan, dan kepemilikan lahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan migrasi.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Analisis Tingkat Pendidikan dan Pendapatan terhadap Minat Masyarakat menjadi Tenaga Kerja Indonesia menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Bayumas Kabupaten pringsewu) (Rika Handayani, 2018)	Tingkat pendidikan	Pendapatan	Tingkat Pendidikan dan Pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
5.	Faktor yang mempengaruhi Minat Tenaga Kerja untuk Bekerja ke Luar Negeri (Tita Merisa Rahmawati, 2010)	Pendidikan (rata-rata lama sekolah)	Umur, status pernikahan, pekerjaan di daerah asal, jumlah tanggungan, dan pendapatan yang di peroleh	1. Rata-rata lama sekolah, umur dan status pernikahan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat Migrasi ke Luar Negeri. 2. Pekerjaan di daerah, tanggungan keluarga, dan pendapatan yang diperoleh berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat Migrasi ke Luar Negeri.
6.	Kemiskinan dan Migrasi: Analisis Data SAKERTI 2000 dan 2007 <i>Poverty and Migration: Analisis of IFLS 2000 and 2007</i>	Lama sekolah dan kemiskinan	Variabel umur, lama sekolah, status pekerjaan dan kegiatan (formal), kepemilikan lahan pertanian, penerimaan bantuan	1. Lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap migrasi. 2. Kemiskinan, variabel umur, status pekerjaan dan kegiatan (formal),

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(Aulia Nabila dan Elda L. Pardede, 2014)			kepemilikan lahan pertanian, penerimaan bantuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap migrasi.
7.	<i>Does a High Minimum Wage Spur Low-Skilled Emigration?</i> (D. Martin dan A. Termos, 2015)	Upah Minimum	Tidak ada karena hanya satu variabel yaitu upah minimum	Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap para tenaga kerja yang berketerampilan rendah.
8.	<i>An Empirical Analysis of International Labour Migration in The Philippines</i> (Frank W. Agbola dan Angelito B. Acupan, 2010)	Kepadatan penduduk	Tingkat melek huruf/pendidikan, biaya migrasi, tingkat inflasi, pengangguran, pendapatan per kapita, dan kestabilan politik	1. Biaya migrasi, tingkat inflasi, pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap migrasi. 2. Tingkat melek huruf/ pendidikan, dan stabilitas politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap migrasi di Filipina 3. Pengangguran dan kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap migrasi di filipina.
9.	<i>Relative Poverty as Determinant of Migration: Evidence from Poland</i> (Oded Stark, Maja Micevska dan Jerzy Mycielski, 2009)	Kemiskinan dan Kepadatan Penduduk	Koefisien Gini, dan Tingkat Pengangguran	Koefisien gini, kepadatan penduduk, tingkat pengangguran dan kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap migrasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Faktor-faktor yang mempengaruhi Migrasi Tenaga Kerja ke Luar Negeri Berdasarkan Provinsi di Indonesia (Wahyu Indah Puspitasi dan Sri Kusreni, 2017)	Rata-rata Lama Sekolah dan Kemiskinan	Pengangguran, dan Produk Domestik Bruto per Kapita	<p>1. Pengangguran, PDRB dan kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap migrasi tenaga kerja Indonesia berdasarkan provinsi di Indonesia.</p> <p>2. Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap migrasi tenaga kerja Indonesia berdasarkan provinsi di Indonesia.</p>
11.	<i>Rural-urban Migration and Wage Determination: The Case of Tianjin, China</i> (LU, Zhigang, & Song, Shunfeng, 2006)	Upah	Tidak ada karena hanya satu variabel yaitu upah	Upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap migrasi.
12.	<i>Macroeconomic Determinants of international Migration from Pakistan</i> (Ahmad Nisar H Hussain M.H.S dan Akram W, 2008)	Upah	Pengangguran, Remitansi dan Inflasi	<p>1. Pengangguran, inflasi dan remitansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap migrasi tenaga kerja di Pakistan. Perilaku migrasi disebabkan oleh faktor makro ekonomi tersebut</p> <p>2. Upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				migrasi tenaga kerja di Pakistan.
13.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Migrasi Kerja Sumatera keluar Negeri (Jamal Mirdad, 2013)	Upah Minimum, Tingkat Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah)	Umur dan Status Pernikahan	Upah minimum, rata-rata lama sekolah, umur dan status pernikahan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tenaga kerja wanita Sumatera Barat keluar Negeri.
14.	Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Kerja (TKI) Keluar Negeri (Waridin, 2002)	Pendidikan/ Rata-rata Lama Sekolah	Umur, Perkawinan, Status Pekerjaan saat masih di Indonesia, Tanggungan Keluarga, Kepemilikan Aset, Pendapatan, Ketersediaan Lapangan Kerja, dan Lama waktu Bekerja di Luar Negeri	1. Pendidikan/rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap migrasi TKI. 2. Status pernikahan, jumlah tanggungan keluarga, dan lama waktu bekerja di luar negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap migrasi TKI.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Selain itu juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh sebab itu maka pada setiap penyusunan

paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir (Sugiyono, 2017: 60).

2.2.1 Hubungan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri

Upah adalah imbalan yang diterima para pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan. Upah minimum provinsi menjadi indikator kemampuan seseorang untuk menerima kompensasi sebagaimana ditentukan oleh pemerintah masing-masing. Upah minimum provinsi mempunyai hubungan negatif terhadap migrasi TKI ke luar negeri, karena apabila upah minimum provinsi meningkat maka migrasi tenaga kerja Indonesia akan menurun.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Najmusaqib (2018) upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap migrasi internasional tenaga kerja di Jawa Tengah. Adanya tenaga kerja dengan tingkat UMP yang rendah membuat seseorang merasa tidak mampu untuk menghidupi keluarganya dan memutuskan untuk merantau ke daerah atau negara lain dengan gaji yang lebih tinggi dari daerah asal migran.

Hasil Penelitian Zhigang dan Shunfeng (2006) bahwa bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap migrasi. Hal tersebut dikarenakan dengan semakin rendah upah yang dihasilkan di daerah asal maka semakin meningkat migrasi tersebut.

Hasil penelitian lain memperkuat penelitian sebelumnya yakni Martin (2015) bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap migrasi

untuk para tenaga kerja yang berketerampilan rendah. Karena seseorang yang memiliki keterampilan yang rendah dan ingin mendapatkan penghasilan yang tinggi seseorang tersebut akan memilih untuk bermigrasi menjadi tenaga kerja di negara tujuan agar dapat menghidupi keluarganya.

2.2.2 Hubungan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri

Rata-rata lama sekolah memiliki hubungan yang erat dengan migrasi tenaga kerja Indonesia. Di negara berkembang seperti Indonesia migrasi lebih banyak dilakukan oleh penduduk yang berpendidikan rendah. RLS mempunyai hubungan negatif terhadap migrasi TKI. Hal tersebut dapat terjadi ketika jumlah tenaga kerja dengan pendidikan rendah lebih mendominasi. Dikarenakan, tidak ada syarat pendidikan minimal yang harus ditempuh oleh TKI, asalkan bisa membaca dan menulis. Kemampuan ini sangat diperlukan untuk mempermudah proses pembekalan para pekerja migran.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Andias (2014) bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap migrasi. Pada penelitian ini di asumsikan semakin tinggi pendidikan seseorang memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk bermigrasi di dalam negeri dibanding ke luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari jenis pekerjaan yang tersedia diluar negeri mayoritas di sektor informal dengan tingkat pendidikan yang rendah. Tenaga kerja cenderung migrasi ke luar negeri sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PRLT), perawat lansia, pengasuh

anak, pekerja pabrik, penjaga toko, konstruksi, supir, dan pekerja restoran yang tidak membutuhkan tingkat pendidikan tinggi.

Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat migrasi ke luar negeri. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan mengurangi minat migrasi ke luar negeri.

Hasil penelitian lain memperkuat penelitian sebelumnya yakni penelitian Mirdad (2013) bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tenaga kerja wanita keluar negeri, dikarenakan seseorang dengan lulusan sekolah dasar dan menengah akan kalah saing dengan lulusan perguruan tinggi. oleh sebab itu seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah dan ingin mendapatkan pendapatan yang tinggi sangat tertarik terhadap migrasi ke luar negeri.

2.2.3 Hubungan Kepadatan Penduduk terhadap Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dengan luas wilayahnya. Semakin luas wilayahnya, maka semakin banyak pula peluang penduduk untuk menempati wilayah tersebut. Kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap migrasi TKI. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk yang semakin tinggi maka akan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan keterbatasan sumber daya di suatu wilayah yang padat penduduk akan memberikan kepekaan bagi penduduk lain untuk mencari

sumber daya di daerah atau negara lain. Sehingga, dari sana timbulah suatu migrasi penduduk ke daerah atau negara lain.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Strak dan Mycielski (2009) bahwa kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap migrasi internasional. Dikarenakan semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu wilayah maka akan semakin bertambah masyarakat untuk melakukan migrasi internasional.

Hasil penelitian lain memperkuat penelitian sebelumnya yakni penelitian Najmusaqib (2018) bahwa kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap migrasi internasional tenaga kerja. Hal tersebut dikarenakan ketika kepadatan penduduk disuatu wilayah semakin tinggi maka luas wilayah tersebut tidak akan bertambah. Oleh sebab itu semakin sempitnya kesempatan kerja diwilayah tersebut yang dapat mengakibatkan pengangguran semakin tinggi sehingga masyarakat melakukan migrasi internasional untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.2.4 Hubungan Kemiskinan terhadap Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri

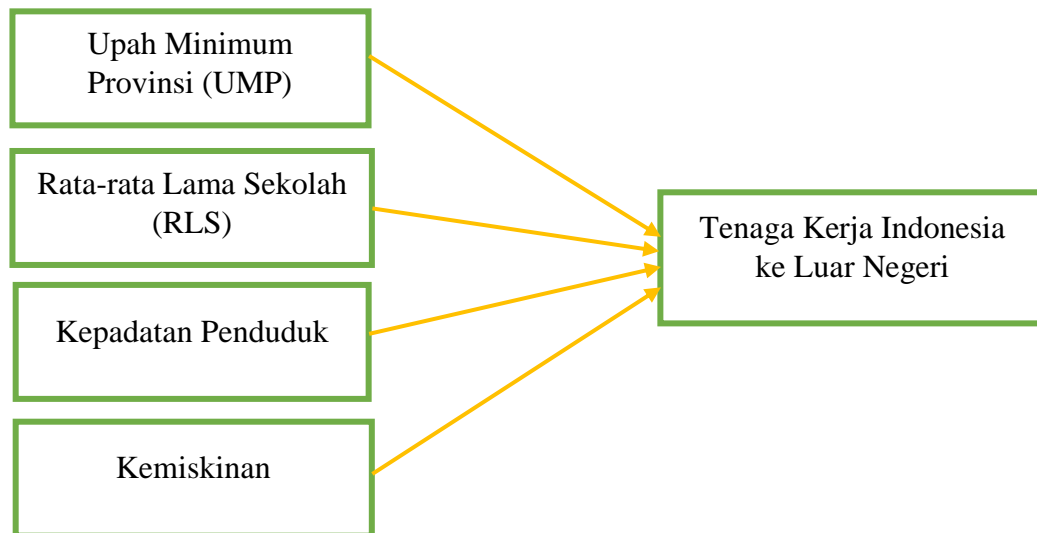
Kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai ketidakmampuan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin tercapainya standar kualitas hidup. Kemiskinan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap migrasi TKI ke luar negeri. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kemiskinan maka akan semakin tinggi juga migrasi TKI ke luar negeri. Masyarakat miskin pada umumnya tidak mampu memenuhi

kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, pendidikan dan kesehatan, kemampuan berwirausaha, serta terbatasnya akses terhadap kegiatan sosial ekonomi.

Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Nabila dan Pardede (2014) bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap migrasi tenaga kerja Indonesia. Kemiskinan yang semakin meningkat mengakibatkan migrasi TKI ke luar negeri semakin meningkat, sebaliknya apabila kemiskinan menurun maka migrasi TKI ke luar negeri akan mengalami penurunan.

Hasil penelitian lain memperkuat penelitian sebelumnya yakni penelitian Puspitasari dan Kusreni (2017) bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap migrasi tenaga kerja di Indonesia. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kemiskinan, maka akan semakin bertambah banyak migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Oleh sebab itu, sebagian besar kemiskinan itu adalah seseorang yang tidak memiliki keahlian, tidak memiliki tanah, dan juga tidak ada kesempatan untuk berusaha di tempat asalnya. Hal tersebut menjadi alasan seseorang untuk melakukan migrasi dengan tujuan keluar dari status kemiskinannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka muncul kerangka pemikiran yang dianggap perlu dilakukan pengujian berkaitan dengan upah minimum provinsi (UMP), rata-rata lama sekolah (RLS), kepadatan penduduk, dan kemiskinan terhadap migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, maka tergambarlah kerangka pemikiran seperti berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka dapat dikemukakan suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian ini yaitu:

1. Diduga secara parsial kepadatan penduduk dan kemiskinan berpengaruh positif sedangkan upah minimum provinsi dan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (studi kasus 8 provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2020).
2. Diduga secara bersama-sama upah minimum provinsi, rata-rata lama sekolah, kepadatan penduduk, dan kemiskinan berpengaruh terhadap migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (studi kasus 8 provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2020).